

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian dengan mengkupas data terbaik dalam penelitian ini yang diambil dari buku dan literatur serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Penelitian Lapangan

Adalah penelitian dengan mencari informasi atau data-data yang diperlukan untuk dianalisis serta dikaji. Penelitian lapangan dilakukan pada dinas-dinas, dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, dan Badan Pusat Statistik Nasional.

3. Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dari publikasi dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah publikasi data dari Badan Pusat Statistik mengenai PDRB, statistik kesejahteraan rakyat, Lampung Barat dalam angka, dan lain-lain.

4. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penulisan ini meliputi alat analisis kuantitatif dan kualitatif.

1. Analisis Kuantitatif

- a) Alat analisis yang digunakan dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi digunakan formulasi model pertumbuhan:

$$g = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

g = Laju pertumbuhan ekonomi

PDRB_{t-1} = PDRB menurut harga konstan tahun 2000, sebelum tahun perhitungan.

PDRB_t = PDRB menurut harga konstan tahun 2000, tahun perhitungan

- b) Untuk mengukur besarnya tingkat ketimpangan sesudah digunakan Koefisien Gini dengan formulasi:

$$G = 1 - i \frac{\sum P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan:

G = Koefisien Gini

P_i = Persentase rumah tangga

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan*

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sebelumnya*

*)Besarnya pendapatan per kapita diperoleh dengan menggunakan pendekatan rata-rata konsumsi/pengeluaran per kapita sebulan dalam setahun.

2. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif ini dimaksudkan sebagai pendukung alat analisis kuantitatif agar tujuan penelitian tercapai, yaitu dengan menggunakan Data Tabulasi Silang. Maksud dari Data Tabulasi Silang ini adalah untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

5. Terminologi Ketimpangan

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan dan bisa berbeda (bervariasi) dari nol (persamaan sempurna) sampai satu (ketimpangan sempurna). Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah:

- a) Lebih dari 0,5 adalah berat.
- b) Antara 0,35 sampai dengan 0,5 adalah sedang.
- c) Kurang dari 0,35 adalah ringan.

B. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

1. Kondisi Wilayah

Kabupaten Lampung Barat dimana Ibu kota Kabupaten ini terletak di Liwa merupakan salah satu daerah yang bisa dianggap sangat penting di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah

penyangga bagi Kota madya Bandar Lampung terutama dalam hal penyediaan bahan pangan dan hasil pertanian serta perkebunan.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Barat berada antara koordinat antara $4^{\circ} 47' 16'' - 5^{\circ} 56' 42''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ} 35' 8'' - 104^{\circ} 33' 51''$ Bujur Timur. Daerah ini terletak di bagian Barat Pulau Sumatera. Kabupaten Lampung Barat beriklim tropis.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 1991 tanggal 6 Agustus 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat dari pemekaran wilayah Kabupaten Lampung utara, maka batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Selat Sunda..
- c. Sebelah Barat : dengan Samudera Hindia.
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.

Wilayah Kabupaten Lampung Barat mayoritas merupakan daerah pedesaan yang sudah dianggap modern sehingga memungkinkan untuk terus berkembang. Tetapi masih ada beberapa daerah di kabupaten ini yang kurang menikmati hasil-hasil pembangunan.

Bila melihat dari segi tata guna tanah maka lahan yang tersedia dapat digunakan untuk berbagai sektor, seperti sektor pertanian, industri, jasa, dan untuk penyelenggaraan fasilitas sosial kemasyarakatan lainnya seperti Puskesmas, sekolah, dan balai warga.

2. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan di Wilayah Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 17 kecamatan. Pada tabel 5 berikut disajikan luas wilayah Kabupaten Lampung Barat menurut kecamatan.

Tabel 5. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat menurut Kecamatan.

Kecamatan	Luas	
	(Km ²)	%
Pesisir selatan	699,52	14,13
Bengkunat	634,41	12,82
Bengkunat Belimbing	634,41	12,82
Ngambur	131,99	2,67
Pesisir tengah	110,01	2,22
Karya Penggawa	62,46	1,26
Pesisir Utara	307,18	6,21
Lemong	327,25	6,61
Balik Bukit	195,50	3,95
Sukau	218,48	4,41
Belalau	395,06	7,89
Sekincau	270,90	5,47
Suoh	231,62	4,68
Batu Brak	189,67	3,83
Sumber Jaya	295,12	5,96
Way Tenong	185,48	3,75
Gedong Surian	61,34	1,24
Jumlah	4.950,40	100,00

Sumber: data diolah

Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat 4.950,4 km² atau 13,99 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung yang membujur dari wilayah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus hingga sebelah utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way

Kanan. Bila dilihat dari luas daerah kecamatan maka kecamatan dengan daerah terluas adalah kecamatan Pesisir Selatan yaitu 699,52 km², sedangkan kecamatan dengan luas tersempit adalah Kecamatan Gedong Surian yaitu 61,34 km².

Tabel 6. Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Lampung Barat

Luas Kabupaten Lampung Barat Menurut Penggunaannya (Ha).

A. Lahan Sawah		58875
➤ Irigasi teknis	3486	
➤ Irigasi setengah teknis		2785
➤ Irigasi sederhana	1712	
➤ Irigasi desa/non PU	7694	
➤ Tadah hujan	48621	
➤ Pasang surut	718	
➤ Lebak	612	
➤ Polder lainnya		2436
B. Bukan lahan sawah		57624
➤ Pekarangan	25372	
➤ Tegal/kebun	76376	
➤ Ladang/huma	55462	
➤ Padang rumput	741	
➤ Hutan rakyat	14615	
➤ Hutan negara	39872	
➤ Perkebunan	32531	
➤ Lain-lain	15343	
➤ Sementara tidak diusahakan	1219	
➤ Rawa-rawa	1445	
➤ Tambak	4747	
➤ Kolam/tebat/empang	589	
Jumlah A+B		417526

Dari tabel di atas terlihat bahwa 17,8947% atau sebesar 56919 merupakan daerah lahan sawah sedangkan sisanya sebesar 82,1053% merupakan daerah bukan lahan sawah.

3. Ketenagakerjaan

Setiap tahunnya muncul permasalahan umum yang pasti dialami suatu daerah yaitu tingkat angkatan kerja yang semakin tinggi yang juga saling berlomba untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti kita ketahui bahwa terjadi ketidak seimbangan antara pencari kerja dengan lowongan yang tersedia.

Berikut ini adalah tabel 7 mengenai kondisi angkatan kerja di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 7. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Barat Periode 2005 - 2011.

Tahun	Angkatan Kerja (jiwa)
2005	3870
2006	5134
2007	5732
2008	6183
2009	6928
2010	7264
2011	8116

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Lampung Barat dalam Angka*, 2012.

C. Gambaran Ketimpangan Ekonomi Lampung Barat

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pembangunan daerahnya adalah:

Rendahnya ketersediaan infrastuktur, terutama akses transportasi keperintisan dan komunikasi serta listrik pedesaan Sehingga dengan kondisi yang seperti itu menjadi penghambat distribusi pendapatan masyarakat Lampung Barat. Dengan dominannya sektor primer maka kebutuhan sarana dan prasarana sangat mendesak.

Rendahnya tingkat pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan.

Belum optimalnya pemanfaatan Sumber daya dan pengembangan potensi

ekonomi lokal, terutama dalam hal koordinasi dan kerjasama kelembagaan, baik di pusat maupun di daerah dan keuangan daerah, sehingga adanya kelemahan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Belum optimalnya peran kota kecil dan menengah dalam menstimulan pertumbuhan wilayah sehingga peran kota – kota kecil dan menengah sebagai kota perantara dari proses produksi di perdesaan, di kota – kota besar dan metropolitan belum efektif.

Untuk itu pemerintah kabupaten lampung barat perlu upaya maksimal dalam menyusun dan menyiapkan struktur perkotaan dalam usaha menetapkan peran serta fungsi kota untuk mendukung pengembangan kota – kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang sinergis dan saling mendukung. Mengembangkan dan mengoptimalkan peran kota kecil dan menengah sebagai pendukung ekonomi perdesaan serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten lampung Barat dalam pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan Sehingga masyarakat kabupaten Barat dapat menikmati pendapatan secara adil dan merata.